

Politisasi Identitas Keagamaan: Analisis Terhadap Kasus Wisata Halal Masyarakat Daerah Danau Toba

*Eikel Karunia Ginting

Pascasarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

E-mail: eikelginting63@gmail.com

* Corespondent Author

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 8 Nopember 2023

Artikel direvisi : 14 Mei 2024

Artikel disetujui: 17 Mei 2024

Abstrak

Kejadian yang bermula pada tahun 2019 bersumber dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam janjinya ingin membenahi pariwisata terkhusus di Danau Toba. Dirinya mencetuskan pembenahan Danau Toba dengan label wisata halal demi kenyamanan para wisatawan dan turis. Edy Rahmayadi menyinggung soal penertiban peternakan babi milik masyarakat dan pengelolaan rumah makan halal di daerah sekitaran Danau Toba. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat, aktivis dan mahasiswa di daerah Sumatera Utara. Kasus tersebut memicu ketegangan antar kelompok agama di sekitaran Danau Toba. Tulisan ini menganalisis dinamika resistensi masyarakat sekitar Danau Toba atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara menggunakan teori identitas Manuel Castell. Hasil dari analisis yang diurai dalam tulisan ini ialah pemerintah menggunakan kuasa (*power & access*) untuk melegitimasi masyarakat sekitar Danau Toba melalui wacana wisata halal, sebaliknya masyarakat Danau Toba melakukan identitas yang resistan karena bagian dari defensif. Tulisan ini juga menawarkan pendekatan antar kedua kelompok melalui pendekatan intergrup. Pendekatan tersebut bagian dari rekonsiliasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara.

Kata Kunci: Politik Identitas Agama, Resistensi Masyarakat Danau Toba, Mekanisme Politik Identitas, Pendekatan Intergrup

Abstract

*The incident that began in 2019 originated from the statement of the Governor of North Sumatra, Edy Rahmayadi in his promise to fix tourism, especially on Lake Toba. He sparked the improvement of Lake Toba with a halal tourism label for the convenience of tourists and tourists. Edy Rahmayadi alluded to the curbing of community-owned pig farms and the management of halal restaurants in the area around Lake Toba. The statement caused reactions from the community, activists and students in the North Sumatra region. The case triggered tensions between religious groups around Lake Toba. This paper analyzes the dynamics of community resistance around Lake Toba over the North Sumatra Governor's statement using Manuel Castell's identity theory. The result of the analysis described in this paper is that the government uses power (*power & access*) to legitimize the community around Lake Toba through the discourse of halal tourism, on the other hand, the Lake Toba*

community performs a resistant identity because it is part of the defensive. This paper also offers an approach between the two groups through an intergroup approach. This approach is part of the reconciliation that should be carried out by the North Sumatra government.

Keyword: *Religious Identity Politics, Lake Toba Community Resistance, Identity Politics Mechanism, Intergroup Approach*

Pendahuluan

Realita keberagaman masyarakat Indonesia tidak dipungkiri menjadi kekuatan sekaligus kelemahan, dapat menyebabkan perdamaian atau menimbulkan ketegangan.]. Menurut John Titaley, masyarakat Indonesia pada dasarnya masih memegang kuat nilai yang dianggap luhur dan tertinggi dalam kehidupan. Nilai tersebut dapat berupa ajaran agama, nilai kebudayaan, dan ideologi yang menjadi kebiasaan. Nilai yang diyakini secara personal atau kelompok dianggap sebagai penghinaan jika mengalami perubahan Internalisasi nilai menjadi kebenaran tunggal yang memunculkan klaim-klaim kebenaran, bahkan dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat. (Titaley, 2020, 8-9).

Polarisasi antar kelompok dapat terjadi karena berbagai faktor, dalam tulisan ini mengurai pernyataan wisata halal oleh pemerintah dapat menyebabkan perpecahan antar masyarakat. Menteri Pariwisata menetapkan wisata halal yang mengusung perubahan layanan dan sistem pariwisata. Memberi layanan yang ramah dengan wisatawan asing dan menawarkan konsep halal dalam pelayanan bagi turis asing. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab peluang Indonesia sebagai negara destinasi wisatawan muslim sangatlah menjanjikan. Populasi muslim dunia yang mencapai 2,2 miliar juta dapat menjadi pasar global yang besar dalam industri halal, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim dengan angka mencapai 87,2% dari jumlah keseluruhan populasi atau sekitar 229 juta jiwa (Ahdi Riyono, 2021).

Wacana pemerintah mendorong Indonesia menjadi destinasi wisata “halal” memunculkan polemik khususnya di sekitaran daerah Danau Toba. Protes masyarakat sekitar Danau Toba karena merasa terusik dengan istilah wisata halal yang seolah-olah membedakan dengan wisata yang selama ini ada di Danau Toba. Menurut Wildan, dalam penelitian yang bertajuk kebangkitan spiritual Islam dan transformasi pasar menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan wisata halal menunjukkan eksklusivisme karena bahasa “halal” ini menggunakan perspektif satu agama yang dapat menimbulkan polarisasi, dan juga ancaman peyorisasi makna keberagaman di Indonesia (Utama, 2016, 129-30).

Masyarakat sekitar Danau Toba yang mayoritas memeluk agama Kristen memiliki stigma negatif terkait dengan istilah ‘halal’ dan ‘haram’. Sikap masyarakat menentang wacana program Gubernur Sumatera Utara disebabkan karena dianggap mencederai nilai

luhur masyarakat yang sudah hidup berdampingan dan damai di sekitaran Danau Toba (Dewantoro, 2019). Pertentangan sikap Gubernur Sumatera Utara dengan masyarakat sekitar Danau Toba menyoal wacana wisata halal menunjukkan ketegangan identitas. Sebab, ketegangan antara pemerintah dan masyarakat menyangkut soal unsur agama.

Penulis juga menganalisis beberapa artikel yang meneliti topik ini sebelumnya. Artikel pertama berjudul “Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia” yang menjelaskan penolakan wisata halal di empat wilayah di Indonesia (Bali, Toraja, Labuan Bajo, dan Danau Toba) karena sentiment politik identitas. Masyarakat salah menangkap wacana wisata halal karena adanya anggapan negatuis, sekaligus dipengaruhi suasana politik. Pada kasus di Danau Toba pengaruh pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 dan pasca-pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 menjadi penguat sentiment negatif terhadap wisata halal (Makhasi & Rahimadhi, 2020).

Artikel kedua berjudul “Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba” yang menjelaskan bahwa kurangnya pendekatan persuasif menyebabkan wacana wisata halal ditolak oleh masyarakat. Ketiadaan proses negosiasi dan komunikasi publik menyebabkan masyarakat tidak percaya pada program pemerintah. Pemerintah Sumatera Utara dianggap bertindak sewenang-wenang, tanpa ada dialog (komunikasi dua arah) (Tarigan & Basit, 2020).

Dua penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kasus penolakan wacana wisata halal menunjukkan sentiment identitas agama yang terusik, menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Diperparah dengan tidak adanya komunikasi oleh pemerintah terkait penerapan wisata halal tersebut. Maka tulisan ini akan berfokus menganalisis fenomena penolakan wisata halal dari perspektif politik identitas. Kebaruan dalam tulisan ini menguraikan proses terbentuknya polarisasi identitas antara pemerintah Sumatera Utara dan masyarakat sekitaran Danau Toba. Polarisasi terjadi karena sebab-akibat dari identitas yang melegitimasi (*legitimizing identity*) berhadapan dengan identitas yang merasa tertindas (*resistance identity*).

Dalam menganalisis kasus di atas, penulis menggunakan sudut pandang dari Manuel Castell —seorang sosiolog dari Spanyol— yang menjelaskan proses tahapan rekonstruksi identitas di masyarakat. (2020, 8). Castell menjelaskan proses rekonstruksi identitas dipengaruhi oleh “oknum” —salah satunya media massa— yang memanfaatkan situasi ketegangan. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan inter-group untuk menganalisis upaya-upaya yang hendaknya dilakukan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ini.

Pendekatan inter-group mendorong pengutamaan tindakan yang inklusif dan diferensiasi yang positif. Pendekatan tersebut memberi ruang dan wadah untuk saling memberikan gagasan berdasarkan identitas kelompok masing-masing, baik warga sekitar Danau Toba begitu juga dengan pihak pemerintah Sumatera Utara (Ashmore et al., n.d, 33-34).

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan melakukan penelitian terhadap sumber literatur, buku, dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan mengelaborasi data kepustakaan, informasi, dan juga berita.

Adapun tahapan yang penulis lakukan dalam penelitian kepustakaan ialah, (1) mencatat temuan masalah dari beberapa literatur dengan cara eksplorasi informasi yang tersedia dari berbagai sumber; (2) mengklasifikasikan temuan-temuan tersebut ke berbagai topik permasalahan; (3) menganalisis temuan berdasarkan teori yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena berdasarkan teori; (4) memberikan gagasan kritis dan evaluasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan sehingga dapat menjadi wacana solutif bagi permasalahan (Sugiyono, 2008, 35-43).

Hasil dan Pembahasan

Kronologis Labelisasi Wisata Halal Di Danau Toba

Secara umum, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dengan meninggalkan tempat semula menuju suatu tempat dalam rangka mencari nafkah, tamasya atau rekreasi. Pariwisata dilakukan dalam rangka untuk memenuhi dimensi keserasian diri dalam dimensi sosial, budaya, dan alam (Setiawan, 2009, 3).

Pariwisata berdampak langsung bagi wisatawan ataupun tempat yang menjadi tujuan dari wisata tersebut, maka Indonesia sebagai salah satu tujuan destinasi wisata dipersiapkan untuk menunjang kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Wakil Presiden Indonesia, Maaruf Amin menjelaskan bahwa wisata halal terdapat dalam peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Usaha Pariwisata. Meskipun pemerintah belum secara gamblang mengatur regulasi wisata halal, namun dalam peraturan tersebut terkandung mekanisme labelisasi halal. Usaha pariwisata yang halal ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sehingga proses sertifikasi bergantung pada lembaga tersebut. (Menteri Pariwisata Republik Indonesia, 2016, 6-7).

Perkembangan pariwisata halal berpotensi meningkat untuk menjaring wisatawan muslim secara global. Dapat dilihat dari Laporan Mastercard Crescenting Global Travel Market Index (GMTI) 2019, yang memprediksi akan ada 230 juta wisatawan muslim secara global pada tahun 2026. Oleh karena itu, banyak negara mengembangkan wisata halal sebagai bagian dalam pengembangan ekonomi dan wisata. Wisata halal yang ditetapkan oleh Kemenparekraf merujuk pada layanan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim, meliputi penyediaan makanan halal, fasilitas pendukung untuk beribadah: mushola dan tempat wudhu. (Kemenparekraf, 2021).

Wisata Danau Toba yang memiliki potensi eksotis mengundang para wisatawan muslim untuk menikmati keindahan Danau Toba. Realita tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang ada mendorong pembenahan pariwisata. Potensi dan dorongan dari pemerintah pusat— Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)— bekerjasama dengan pemerintahan Sumatera Utara dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Setelah wacana tersebut diberitakan melalui media muncul atensi publik yang menolak secara besar-besaran, bahkan penolakan terjadi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar Danau Toba, tapi juga dilakukan di beberapa tempat seperti Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya. Demo dilakukan mulai dari mahasiswa, pemerhati budaya, pemerhati lingkungan Danau Toba, dan berbagai pihak yang menyatakan bahwa wacana Gubernur Sumatera Utara mencoreng dan melukai keberagaman masyarakat di sekitaran Danau Toba, bahkan di Sumatera Utara (Utomo, 2019).

Legitimasi Identitas Pariwisata Halal Oleh Pemerintah Sumatera Utara

Fenomena wacana wisata halal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah merupakan bentuk kekuatan dan dominasi secara struktural. Merujuk pada teori Manuel Castell tindakan legitimasi yang dilakukan pemerintah mempunyai *power and access* (Buchari, 2007, 24-25). Pemerintah seringkali mendistribusikan kekuasaan tanpa mempertimbangkan situasi konteks yang ada. Menurut Gramsci dalam Castell struktur dan aktor-aktor pemerintah=mempertegas dominasi struktural, menyebabkan wacana dan keputusan yang diambil terkesan dipaksakan (Manuel Castell, 2020, 9-10). Wacana implementasi wisata halal oleh pemerintahan Sumatera Utara menunjukkan dominasi dan hegemoni Gubernur Sumatera Utara sebagai pemegang *power*

yang menegaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang tidak seimbang. Koordinasi dalam setiap wacana tidak terjadi secara seimbang,

Pernyataan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara menegaskan identitas penguasa (elite) —oleh pemerintah pusat dan juga daerah— diimplementasikan melalui pendekatan *soft power*. Wisata halal yang mengandung unsur ajaran Islam di satu sisi menjadi daya tarik karena memberika kenyamanan melalui nilai agama, sebab bagi konsumen (wisatawan) dapat menikmati dan merefleksikan nilai-nilai agama melalui tata kelola wisata. Sebaliknya, wisata halal tidak disetujui oleh warga masyarakat yang non-muslim karena merasa terdiskriminasi. (Alwafi Ridho Subarkah, 2018, 56).

Pendekatan *soft power* melalui nilai ajaran Islam menjadi tantangan di tengah realitas agama di Indonesia yang beragam. Penolakan terjadi karena dalam masyarakat memiliki beragam paradigma keagamaan agama. Istilah “halal” dianggap melabelisasi suatu wilayah dengan unsur agama, padahal wisata merupakan kepentingan publik. Kata “halal” menimbulkan multitafsir dari kalangan non-Islam padahal wisata halal memiliki tujuan untuk menerapkan hospitalitas. Ketegangan persepsi justru dapat menimbulkan menimbulkan ruang-ruang konflik antara masyarakat dan pemerintah, sebab dalam masyarakat Indonesia sangat sensitive istilah agama dibawa ke ruang publik (Alwafi Ridho Subarkah, 2018, 129).

Fenomena wisata halal bukan hanya menimbulkan polemik di Sumatera Utara, namun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Manado, Toraja, Bali menjadi beberapa daerah yang mengalami kasus serupa. Kata “halal” sudah mengalami komodifikasi di zaman sekarang sehingga berdampak pada masyarakat Indonesia yang plural. Merkipun dalam Islam, kata “halal” rentan untuk ditafsirkan berbeda dan dipolitisasi sehingga mengalami pergeseran. Ruang-ruang beragama masyarakat Indonesia mengalami resistan ketika menyinggung masalah doktrin dan kebudayaan yang berbeda di ruang publik.

Labelisasi wisata halal yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk politisasi identitas kekuasaan. Identitas kekuasaan yang melegetimasi pengembangan pariwisata berbasis halal untuk menarik dan mengakomodir kebutuhan wisatawan Islam, tetapi tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal sehingga mendapatkan respon negatif dari publik. (Makhasi & Rahimadhi, 2020, 381-382).

Upaya Resistensi Masyarakat Toba Dalam Mempertahankan Identitas

Resistensi dari masyarakat lokal yang mayoritas berasal dari suku Batak terhadap wacana Gubernur Sumatera Utara memperlihatkan fenomena identitas masyarakat dominan (*dominan class*) yang merasa terancam. Legitimasi pemerintah dianggap bertentangan dan

menggeser identitas budaya setempat. Masyarakat lokal merasa bahwa kata “halal” bertentangan dengan identitas agama masyarakat setempat yang dominan Kristen.

Budaya masyarakat lokal bertentangan dengan ajaran Islam karena berhubungan dengan daging babi. Wacana wisata halal diisukan meniadakan peternakan babi warga sekitar, dan membatasi konsumsi daging babi di wilayah sekitaran Danau Toba. Padahal daging babi dalam konsep budaya Batak selalu digunakan dalam setiap upacara adat, seperti pesta pernikahan, upacara kedukaan dan ketika memberi tongkat (*mambere tukkot*) kepada orang tua (Lansia). Dalam tradisi suku Batak menghidangkan daging babi dan memelihara babi sudah menjadi budaya dan kearifan lokal tersendiri. Banyak keluarga memelihara babi di halaman rumah atau dilepas begitu saja sehingga sudah dianggap menjadi pemandangan biasa di sekitaran Danau Toba (Tarigan & Basit, 2020, 125-126).

Masyarakat lokal di daerah Danau Toba rata-rata memiliki peternakan babi, baik dalam skala kecil maupun menengah sebagai bagian dari investasi dan mata pencaharian dari beternak babi. Babi menjadi komoditi konsumsi domestik di masyarakat Batak sekitar Danau Toba, ataupun dikirim ke daerah sekitar Sumatera Utara bahkan ke luar daerah Sumatera Utara (Tigor Munthe, 2019). Meskipun faktanya peternak lokal kurang menjaga kebersihan kotoran, dan kurang tertib dalam merawat peternakan babinya, sehingga menyebabkan pencemaran di sekitaran Danau Toba. Hal inilah yang memang jadi sorotan Pemprovsum (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). Tekanan dari Pemprovsum tersebut yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian peternak babi (Hidayat, 2019). Masyarakat lokal yang resisten mengakui bahwa selama ini sudah mengkomodifikasi fasilitas dan menghormati wisatawan Islam yang berwisata. Tindakan pemerintah yang mewacanakan wisata halal menimbulkan citra buruk pada masyarakat lokal yang beternak babi, masyarakat lokal dicitrakan seolah-olah tidak peduli dengan kenyamanan wisatawan muslim.

Upaya resistensi masyarakat lokal dilakukan dengan demo massal ke kantor Gubernur dan instansi terkait, serta melakukan penggalangan massa. Salah satu bentuk resistensi dilakukan dengan melakukan Festival Babi yang diinisiasi oleh Togu Simorangkir, seorang pegiat literasi nasional dan aktivis lingkungan Danau Toba. Festival tersebut dilakukan untuk memberdayakan dan mengedukasi para peternak babi, terkait dengan pengelolaan kebersihan. Menurut pengakuan Togu, kampanye penolakan wisata halal dikarenakan masyarakat Toba sudah toleransi dan hormat dengan perbedaan agama dan etnis, tidak seharusnya “wisata halal” disematkan di daerah Danau Toba.

Menurut Manuel Castell, sikap dari masyarakat sekitar Danau Toba merupakan identitas yang resistan (*resistance identity*). Identitas yang resistan menunjukkan upaya penolakan legitimasi pemerintah dengan mengadakan lomba di sekitaran Danau Toba (daerah Muara). Festival babi menjadi bentuk kegiatan yang eksploratif dan menunjukkan bahwa masyarakat Danau Toba menghargai semua agama dengan segala penghormatan terhadap masyarakat muslim yang berwisata (Tmy, 2019).

Manuel Castell menjelaskan bahwa aktor lokal menjadi insiator yang dapat membentuk kesatuan sikap masyarakat. Dalam hal tersebut, Togu Simorangkir sebagai seorang aktor lokal yang mengadakan kegiatan festival babi menunjukkan *defensive identity*. Aktor lokal membentuk sikap memeprtahankan identitas budaya dan lokalitas masyarakat, yang merasa terancam dan kebingungan akibat wacana isu wisata halal. Kehadiran aktor-aktor lokal seperti Togu Simorangkir menunjukkan dukungan, sekaligus memancing atensi publik membangun batasan dan menunjukkan representasi identitas terhadap wacana elit (Gubernur Sumatera Utara).

Identitas yang resistan memberikan makna baru dengan bertransformasi dan melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi untuk melawan pihak yang berupaya melegetimasi. Festival babi menjadi otokritik terhadap pemerintah Sumatera Utara yang menyematkan identitas halal dalam sektor wisata di Danau Toba. Kegiatan festival bukan hanya sekedar perlombaan, tapi ada pemberdayaan, edukasi, penyadaran peternak babi, serta pengelolaan limbah dari kotoran babi. Upaya resistensi masyarakat Toba menurut Castell, merupakan tindakan yang menegaskan identitas kolektif. Kolektivitas yang ditunjukkan akibat perasaan yang terancam, sekaligus memberikan batasan terhadap pemerintah dalam melegetimasi wacana halal terhadap wilayah lokal (adat Batak) (Manuel Castell, 2020, 10-11). Festival Babi menunjukkan aktor lokal dapat menjadi educator yang melakukan resistensi. Memberikan perlawanan bahwa wacana harus melibatkan dan mempertimbangkan masyarakat lokal bukan hanya regulasi dari atas (elit).

Dibalik Isu Panas Wisata Halal di Danau Toba

Dibalik permasalahan yang muncul, terdapat faktor-faktor yang membuat polarisasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat di daerah Danau Toba semakin membesar. Isu wacana halal melebar menjadi isu agama dikarenakan terjadinya disparitas informasi, baik dari media online dan sosial. Merujuk pada tulisan Manuel Castell, di era masyarakat jejaring saat ini demkoratisasi pernyataan menjadi dilematis dikarenakan dapat menimbulkan

konflik. Dalam masyarakat jejaring sumber kebenaran dan berita tidak lagi terpusat (*centralized*) (Manuel Castell, 2020, 34-35).

Citra politik identitas terhadap Edy Rahmayadi disebabkan karena informasi yang beredar. Diawali= ketika maraknya kasus politik identitas di tahun 2017 yang terjadi pada pemilu Jakarta antara kubu Anies Baswedan dan kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menggandeng Djarot Syaiful Hidayat (Djarot) sebagai wakil gubernur di pilkada Jakarta tahun 2017. Pasca kekalahan kubu Ahok, Djarot ikut dalam kontestasi politik di pemilihan Gubernur Sumatera Utara dengan menggandeng Sihar Sitorus putra asli daerah Danau Toba. Paslon Gubernur ini bertarung dengan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

Menyoroti pertarungan kedua kubu, baik kubu Edy Rahmayadi dan Djarot memainkan isu identitas etnis dan agama. Edy Rahmayadi yang bukan putra asli Sumatera Utara memainkan isu agama dengan merangkul umat-umat muslim di Sumatera Utara dengan beragam kegiatan, bahkan mendatangkan Ustad Abdul Somad (UAS) ke kota Medan untuk memberikan siraman rohani dan doa bersama menjelang pemilihan. Sedangkan, paslon lainnya, Sihar Sitorus dan Djarot sendiri memainkan isu nasionalisme dan cenderung melakukan kampanye ke masyarakat Kristen di Sumatera Utara dan sekitar Danau Toba.

Pertarungan identitas agama menimbulkan dampak negatif yang disebut Antoni Gramsci sebagai logika perbedaan dan logika persamaan (*The logic of difference and the logic of equivalence*) karena terbentuk persepsi pemisahan. Persepsi ini yang mempengaruhi masyarakat sekitar Danau Toba untuk melegitimasi Edy Rahmayadi sebagai pembela kelompok muslim. Sedangkan, Sihar Sitorus dan Djarot dianggap sebagai representasi masyarakat daerah Danau Toba karena mengangkat semangat nasionalis. Kekalahan kelompok Sihar Sitorus dan Djarot berdampak pada masyarakat Toba yang menjadi *resistance identity* dan memiliki logika perbedaan (*logic difference*) terhadap kubu Edy Rahmayadi (Ian Pasaribu, 2018, 19-24).

Pengaruh pemisahan akibat kontestasi politik menyebabkan ketakutan masyarakat Daerah Toba karena diisukan menjadi tempat perkumpulan umat muslim. Infrastruktur Danau Toba yang dibangun bernuansa syariah merupakan bukti nyata dari keresahan dan ketakutan mayoritas (kelompok agama Kristen). Fenomena ini menunjukkan identitas yang resistan disebabkan ketakutan masyarakat mengarah pada islamofobia (gtp/ae, 2019).

Analisis: Membaca Mekanisme Politik Identitas Dalam Kasus Wisata Halal

Mekanisme politik identitas menurut Stephen Lawler sebagai bentuk perbedaan identitas yang saling diperjumpakan. upaya konstruksi dan rekonstruksi identitas sebagai

bentuk melegitimasi kepentingan. Diperjelas juga oleh Calhoun dalam Lawler, bahwa identitas bersifat dinamis dan tidak tunggal namun seringkali identitas bersifat proyek dan politis untuk kepentingan partisipasi, pemberdayaan baik dari pengalaman, potensi ataupun budaya (Steph Lawler, 2014, 10). Dengan pemaknaan identitas yang tunggal konstruksi dan rekonstruksi identitas akan menimbulkan konflik. Identitas memberi makna dan tujuan tertentu terhadap personal ataupun kelompok karena bagian dari pengakuan. Menurut Buchari, politik identitas merupakan mekanisme adaptasi masyarakat yang ingin memperebutkan atau mendapatkan pengakuan publik atau kelompok (Buchari, 2007, 38-42).

Legitimasi yang dilakukan pemerintahan daerah dan pusat terhadap wisata Danau Toba mengganggu lokalitas konteks yang ada di masyarakat Toba. Tidak dapat dipungkiri pluralitas masyarakat sekitar Danau Toba menjunjung nilai penghargaan dan keberagaman sehingga legitimasi wisata halal menjadi permasalahan. Kata “halal” menyangkut salah satu doktrin agama yaitu Islam, sehingga mengalami penolakan karena perbedaan ajaran keagamaan dengan mayoritas kelompok di sekitaran Danau Toba (Steph Lawler, 2014, 9). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara mengusik keyakinan yang sudah terinternalisasi dalam diri setiap masyarakat di sekitaran Danau Toba, apalagi berhubungan juga dengan budaya dan ekonomi karena mengubah sistem kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung turun-temurun.

Merujuk pada tulisan Saira Yasmin, maka kontroversi ini menyinggung tiga aspek dalam komponen pembentuk identitas, aspek agama, etnis, yang di dalamnya jelas terdapat aspek kultural. Aspek identitas agama menguat dan menimbulkan pertentangan. Hal tersebut disebut dengan pseudospesiasi agama, terjadinya pembedaan dan identitas yang mengeras. Pembentukan antara kelompok ‘saya’ dan ‘kalian’ yang berpotensi dan rentan terhadap ancaman konflik. Agama memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Toba, identitas agama mayoritas (Kristen) menunjukkan kolektif sosial (Yamin, 2008, 9).

Aspek etnis yang mengandung aspek kultural juga mengalami pertentangan dalam wacana ‘wisata halal’. Kata ‘halal’ langsung dikonotasikan dengan larangan ataupun pantangan terhadap budaya masyarakat Batak yang menggunakan makanan babi. Babi memiliki makna yang erat dengan kebiasaan adat dan kultur masyarakat Batak. Berdasarkan tulisan Defri E Simatupang, daging babi bukan sekedar syarat formal adat Batak tetapi bermakna solidaritas dan kesetaraan. Makanan babi sebagai unsur perekat kekeluargaan karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, komunikasi, dan demokrasi melalui pembagian makanan babi melalui upacara adat. Babi menjadi simbol penting masyarakat Batak karena

memelihara babi sebagai konsumsi dan dapat menguntungkan secara ekonomi. (Simatupang, 2012, 55-59).

Mekanisme politik identitas yang dilakukan pemerintahan pusat melalui Gubernur Sumatera Utara merupakan upaya pendominasian (Widjaja, 2020, 340). Pendominasian dilakukan karena pemerintah memiliki kekuasaan dan akses menyatakan wacana dan mengimplementasikan rancangan-rancangan terhadap masyarakat kelas bawah. Menurut Siswati Saragih implementasi yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara seringkali dilakukan tanpa koordinasi dengan masyarakat setempat. Menyebabkan keputusan pemerintah tidak melibatkan aktor lokal dan kurang mempertimbangkan budaya masyarakat lokal (Saragih, 2021, 51-52). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah mendiskreditkan budaya yang selama ini dihidupi masyarakat.

Menurut Manuel Castell, identitas pertentangan antara identitas yang melegitimasi dan kelompok yang dilegitimasi merupakan bentuk nyata dari konstruksi dan rekonstruksi identitas. Tindakan yang dilakukan oleh identitas yang resistan (masyarakat sekitar Danau Toba) membangun identitas defensif dalam rangka menunjukkan dominasi, sekaligus membalikkan nilai dan memperkuat batasan-batasan terhadap legitimasi kelompok yang ingin berupaya merekonstruksi (pemerintah Sumatera Utara) (Manuel Castell, 2020, 9).

Belajar dari kasus wisata halal, mekanisme politik identitas terbentuk karena upaya resistensi. Resistensi yang muncul karena rasa ketidakadilan atas wacana yang seolah-olah mendiskreditkan agama dan budaya yang dihidupi masyarakat sekitar Danau Toba. Menurut Geovasky, pengalaman ketidakadilan merupakan represi dari pihak penguasa yang ingin mendominasi sehingga mengancam identitas dan keberadaan kelompok masyarakat (Immanuel Geovasky, 2018). Tindakan resistensi dilakukan sebagai upaya resiliensi kelompok masyarakat. Upaya seperti demo massal, festival babi, dan melalui media sosial, merupakan upaya masyarakat lokal untuk mencari rekognisi di ruang publik.

Tawaran Pendekatan Inter-Group Dalam Problem Solving

Dalam tulisan Woodward, persoalan agama dalam kehidupan publik selalu berbenturan dengan persoalan daerah dan kesukuan. Pengelolaan masalah agama di ruang publik menjadikan permasalahan lebih kompleks. Konflik yang mengatasnamakan agama sangat berdampak dalam komunitas masyarakat Indonesia (Mark Woodward, 2014, 74-74).

Permasalahan wisata halal di daerah Danau Toba menunjukkan pemisahan antara kelompok agama mayoritas dan minoritas. Dibutuhkan tawaran tindakan dan perilaku yang menjadi alternatif, ialah dialog yang dinamis secara vertikal dan horizontal. Dialog antar

identitas, antara pemerintahan Sumatera Utara dan masyarakat sekitar Danau Toba perlu dilakukan. Dialog sebagai ruang perjumpaan antara pemerintah dalam wacana pembangunan pariwisata dan juga masyarakat sebagai tuan rumah. Hal inilah diperlukan politisasi identitas yang mengarah pada kepentingan bersama, bukan yang hanya bersifat primordial dan kepentingan sekelompok pihak. Melalui dialog akan ada pertimbangan-pertimbangan etis dan konstruktif yang tidak merugikan masing-masing kelompok (Jimmy M.I. Sormin, 2020, 36-37).

Dialog menurut Richard Ashmore merupakan ruang intergrup. Relasi intergrup dibangun atas dasar prinsip *equal to others* dan berdampak pada kesepahaman antar kelompok (Ashmore et al., n.d, 23-26). Jika dianalisis, pemerintah Sumatera Utara (*elite group*) belum berupaya membangun kohesi sosial terhadap kelompok masyarakat lokal. Maka dari itu, tawaran intergrup adalah dorongan untuk melakukan tindakan perjumpaan antar kelompok, sebagai upaya dalam memahami persepsi dan prasangka (Karina V. Korostelina, *Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications*, Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications, 2007, 128-129. Diperlukan ruang perjumpaan agar legitimasi identitas dari pemerintah terkhusus Gubernur Sumatera Utara, dapat dipahami menjadi tanggung jawab pengembangan wisata secara bersama.

Ruang intergrup membutuhkan kesadaran bahwa dalam perjumpaan saling memberi diri dan membangun solusi alternatif. Dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, sama sekali belum melakukan upaya tersebut dan terkesan melakukan pembelaan terhadap wacana yang diungkapkan ke publik. Tanpa upaya-upaya pengejawantahan nilai dan makna dari wisata halal, serta efek yang dapat ditimbulkan melalui pariwisata halal bagi masyarakat sekitar Danau Toba.

Melalui upaya intergrup hendaknya polemik identitas legitimasi dan resisten menjadi sarana membangun keberagaman identitas. Sebagai ruang yang komprehensif, perjumpaan intergrup dapat melihat dan melakukan pengembangan wisata halal di daerah Sumatera Utara dengan memperhatikan kepentingan bersama (Dovidio et al., 2007, 319-323).

Simpulan

Bercermin dari kasus wisata halal, konstruksi dan rekonstruksi identitas dipengaruhi oleh politik yang memisahkan antara pemerintah Sumatera Utara dan masyarakat sekitar Danau Toba. Studi kasus wisata halal menunjukkan legitimasi dari atas (*elite legitimizing*) sebagai bagian dari kekuatan (*power*) oleh pemerintah Sumatera Utara, sebaliknya masyarakat Danau Toba merasa terusik dengan wacana wisata halal tersebut.

Menilik pernyataan Castell, identitas yang resistan sebagai bentuk resistensi terhadap perubahan ataupun upaya untuk mendominasi identitas yang ada. Ketegangan identitas agama dalam kasus wisata halal menjadi akumulasi dari pertarungan identitas yang menggunakan identitas agama dan budaya. Perspektif yang saling bertentangan antara kedua kelompok (masyarakat lokal dan pemerintahan Sumatera Utara) perlu saling membangun ruang-ruang partisipatif dan edukasi tentang wisata halal.

Maka, dalam pertarungan identitas agama untuk memecah ketegangan dan saling merekognisi identitas perlunya ruang inter-group untuk mencairkan kontestasi identitas yang berbeda. Adanya pertemuan dan ruang untuk menciptakan distribusi pendapat yang selama ini tertutup, sehingga menimbulkan perasaan yang saling menghormati dan menghargai nilai perbedaan yang dianut. Politisasi identitas keagamaan tidak terelakkan dan dapat terjadi oleh siapa saja, namun yang harus didorong adalah upaya politik identitas positif untuk membangun kemaslahatan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Ahdi Riyono. (2021). Mengakhiri Salah Paham Wisata Halal. *News.Detik.Comews.Detik.Com*. <https://news.detik.com/kolom/d-5344097/mengakhiri-salah-paham-wisata-halal>
- Alwafi Ridho Subarkah. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sospol*. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/5979/6094>
- Ashmore, R. D., Jussim, L., & Wilder, D. (n.d.). Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction, Volume 3 (Vol. 3).
- Buchari, S. A. (2014). Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas (A. Bainus (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewantoro. (2019). Mahasiswa Peduli Danau Toba Protes Pernyataan Gubernur Sumut soal Wisata Halal Halaman all - Kompas.com. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/02/18392211/mahasiswa-peduli-danau-toba-protos-pernyataan-gubernur-sumut-soal-wisata?page=all>
- Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Saguy, T. (2007). Another view of “we”: Majority and Minority Group Perspectives on A Common Ingroup Identity. *European Review of Social Psychology*, 18(1), 296–330. <https://doi.org/10.1080/10463280701726132>
- gtp/ae. (2019). Salah Persepsi “Wisata Halal.” *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/salah-paham-seputar-wisata-halal/a-51167763>

- Hidayat, A. A. N. (2019). Limbah Peternakan Babi Dinilai Sumbang Kerusakan Danau Toba - Bisnis Tempo.co. *Bisnis.Tempo.Co.* <https://bisnis.tempo.co/read/1164479/limbah-peternakan-babi-dinilai-sumbang-kerusakan-danau-toba>
- Ian Pasaribu. (2018). *Bekerjanya Politisasi Identitas Pilkada SUMUT 2018 (Menakar Pengaruh Isu Agama Terhadap Kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)*. Adhyasta Pemilu, 1 No 1. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/2/3>
- Immanuel Geovasky. (2018). Terorisme dalam Sudut Pandang Politik Identitas. CRCS UGM. <https://crcs.ugm.ac.id/terorisme-dalam-sudut-pandang-politik-identitas/>
- Jimmy M.I. Sormin. (2020). Bermula dari "Tuhan": Bahasa Bersama dan Religiositas Indonesia Untuk Menghadapi Fenomena Politik Identitas dan Krisis Kebangsaan. In Agama, Politik Identitas dan Keberpihakan Negara. *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*.
- Kemenparekraf. (2021). Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia. *Kemenparekraf.Go.Id.* <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>
- Korostelina, K. V. (2007). *Social identity and conflict: Structures, dynamics, and implications*. In *Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230605671>
- Makhasi, G. Y. M., & Rahimadhi, M. T. Y. (2020). Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 373. <https://doi.org/10.14421/JSR.V14I2.1767>
- Manuel Castell. (2020). *The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture*. In *The Power of Identity Claims* (pp. 1–7). <https://doi.org/10.4324/9781003011590-1>
- Mark Woodward. (2014). *State-Religion Relation In Indonesia: A Comparative Perspective*. In *Dealing With Diversity: Religion, Globalization, Violence, Gender and Disaster in Indonesia*. *Globalethics.net*.
- Menteri Pariwisata Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (pp. 1–19).
- Saragih, S. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Daerah Wisata Danau Toba Sumatera Utara. *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa*, 1, 21–29.
- Setiawan, I. (2009). *Kajian Multi Disiplin Ilmu: Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers

Unisbank.

- Simatupang, D. E. (2012). *Penempatan Babi Sebagai Daging Konsumsi Dalam Pesta Adat Masyarakat Batak*. In *Fauna Dalam Arkeologi: Seri Warisan Budaya Sumatera Bagian Sumatera Utara. Balai Arkeologi Medan*.
https://www.academia.edu/41926223/Penempatan_Babi_Sebagai_Daging_Konsumsi_Dalam_Pesta_Adat_Masyarakat_Batak
- Steph Lawler. (2014). *Identity: Sociological Perspective (2nd ed., Vol. 21, Issue 1)*. Polity Press. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Tarigan, R. E., & Basit, A. (2020). *Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba*. Nyimak: Journal of Communication, 4(1), 125.
<https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2224>
- Tigor Munthe. (2019). *Cerita Jelang Festival Babi Danau Toba 25-26 Oktober* | Tagar. Tagar.Id. <https://www.tagar.id/cerita-jelang-festival-babi-danau-toba-2526-oktober>
- Titaley, J. (2020). *Umat Beragama Menyikapi Politik Identitas dan Komodifikasi Agama Dalam Kontestasi Politik di Indonesia*. In *Agama, Politik Identitas dan Keberpihakan Negara. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*.
- Tmy. (2019). *Antara Wisata Halal Danau Toba dan Festival Babi pada 25 Oktober Mendatang* - Tribun-medan.com. Medan.Tribunnews.Com.
<https://medan.tribunnews.com/2019/09/03/antara-wisata-halal-danau-toba-dan-festival-babi-pada-25-oktober-mendatang>
- Utama, W. S. (2016). *Incorporating Spirituality and Market: Islamic Sharia Business and Religious Life in Post-New Order Indonesia*. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 20(2), 113–137. <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i2.4798>
- Utomo, P. (2019). *Polemik Wisata Halal Danau Toba, Mahasiswa Demo ke Kantor Gubernur*. <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/prayugo-utomo-1/polemik-wisata-halal-danau-toba-mahasiswa-demo-ke-kantor-gubernur?page=all>
- Widjaja, P. S. (2020). *Tantangan Dan Prospek Relasi Antarumat Beragama*. In P. S. W. & W. S. Wibowo (Ed.), *Meretas Diri, Merengkuh Liyan, Berbagi Kehidupan*. BPK-Gunung Mulia.
- Yamin, S. (2008). *Understanding religious identity and the causes of religious violence*. Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, 1(1), 1–21.